

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/358916226>

Ekonomi, Garis Massa dan Pendidikan

Chapter · September 2009

CITATIONS
0

READS
39

1 author:



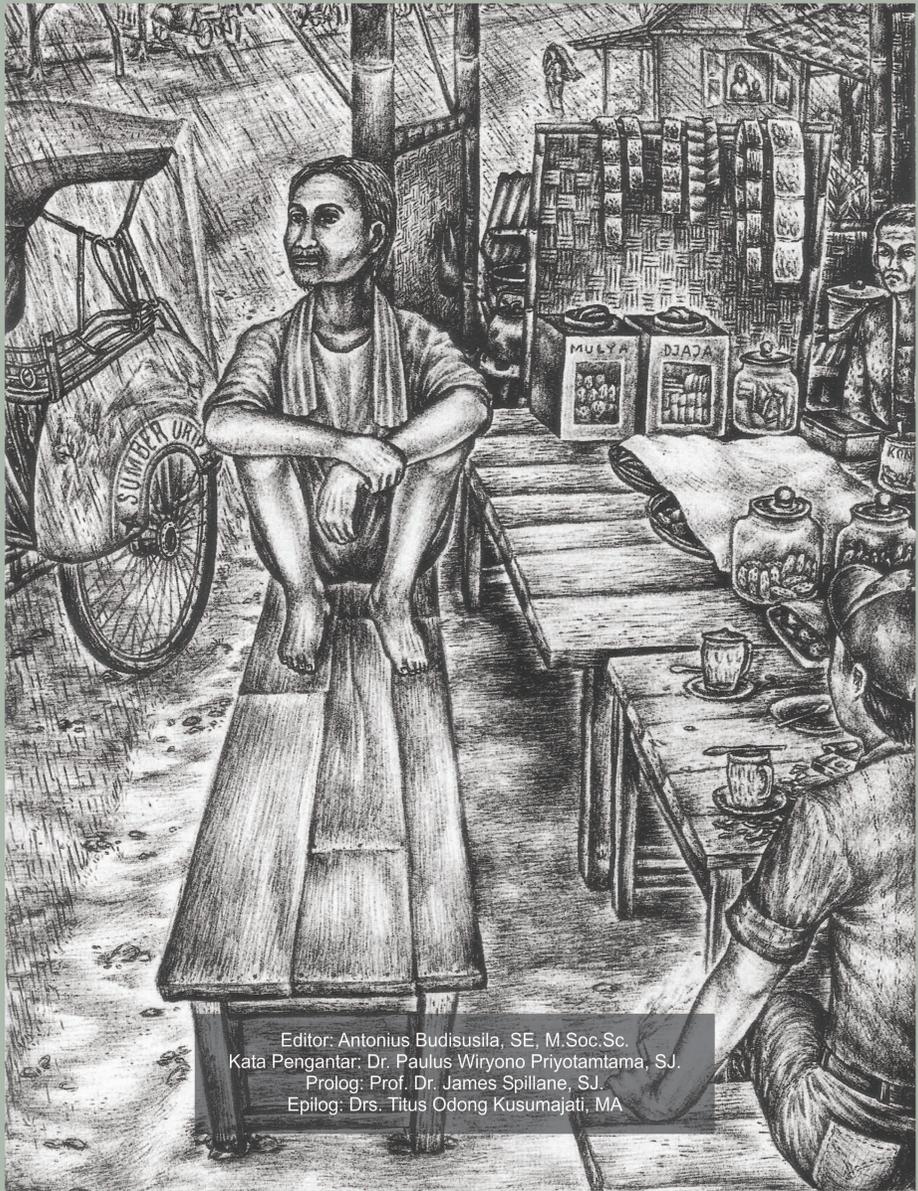
[Antonius Budisusila](#)
Sanata Dharma University

18 PUBLICATIONS 19 CITATIONS

SEE PROFILE

RAKYAT, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI:

MENUJU PENDIDIKAN EKONOMI KERAKYATAN



Editor: Antonius Budisusila, SE, M.Soc.Sc.
Kata Pengantar: Dr. Paulus Wiryono Priyotamtama, SJ.
Prolog: Prof. Dr. James Spillane, SJ.
Epilog: Drs. Titus Odong Kusumajati, MA

**RAKYAT, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI:
MENUJU PENDIDIKAN EKONOMI KERAKYATAN**

**RAKYAT, PENDIDIKAN,
DAN EKONOMI:
MENUJU PENDIDIKAN EKONOMI
KERAKYATAN**

*Pandangan dari Para Sahabat
Mengenang Drs. Theo Gieles Gilarso, SJ.*

Editor

Antonius Budisusila, S. E., M. Soc. Sc.

Kata Pengantar

Dr. Paulus Wiryono Priyotamtama, SJ.

Prolog

Prof. Dr. James Spillane, SJ.

Epilog

Drs. Titus Odong Kusumajati, MA



Pusat Pengembangan Manajemen
Fakultas Ekonomi USD
bekerjasama dengan
Penerbit Universitas Sanata Dharma

RAKYAT, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI: MENUJU PENDIDIKAN EKONOMI KERAKYATAN

© USD 2009

PENERBIT UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Ext. 1527/1513
Fax. (0274) 562383
Jl. Affandi, Gejayan Mrican Yogyakarta 55281
e-mail: lemlit@staff.usd.ac.id

Budisusila, Antonius (Ed.)

Cetakan Pertama

xxv, 239 hlm.; 14.8 x 21 mm

Bibliografi: hlm. 233

ISBN : 978-979-1088-32-9

EAN : 9-789791-088329

Desain Cover: Pius Sigit

Judul Ilustrasi Sampul:

“Sejak Pagi Hujan Tak Reda” oleh Surya Wirawan

Editor Bahasa : S. E. Peni Adji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa ijin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar (Dr. Paulus Wiryana Priyatamtama, SJ.)	v
Daftar Isi	xix
Daftar Gambar dan Tabel	xxi
Prolog: Drs Theo Gilies Gilarso, SJ-Sang Ekonom Pendidik (Prof. Dr. Jammes Splillane, SJ.)	1
BAGIAN I: PENDIDIKAN BAGI PENGGERAK DAN GERAKAN RAKYAT	
BAB 1 Pergumulan Ikatan Petani Pancasila Usaha oleh dan untuk Kaum Tani Menuju Kemandirian (Dr. G. Budi Subanar, SJ.)	21
1. Pengantar	21
2. Kemunculan Gerakan	22
3. Perkembangan Gerakan	25

	4 Pendidikan Kemandirian (Petani) Selanjutnya	28
	5. Nasib Petani Jaman Sekarang	31
BAB 2	Ekonomi, Garis Massa dan Pendidikan (<i>Antonius Budisusila, S.E., M.Soc.Sc.</i>)	35
	1. Pengantar	35
	2. Arena Ekonomi, Kekuasaan dan Kebutuhan	37
	3. Kelembagaan Ekonomi Sekarang	42
	3.1. Teori Pasar dan Pilihan Publik	42
	3.2. Pendidikan dan Garis Massa	46

BAGIAN II: EKONOMI PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN EKONOMI

BAB 3	Globalisasi Pendidikan: Permasalahan dan Tantangan bagi Perguruan Tinggi Indonesia (<i>Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.</i>)	53
	1. Pengantar	53
	2. Lingkungan Eksternal Pendidikan Tinggi dan permasalahannya	56
	3. Bagaimana Menjawab Tantangan Global Pendidikan Tinggi?	61
	4. Penutup	70
BAB 4	Pendidikan dalam Pusaran Arus Industrialisasi Global: Implikasi Bagi Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Manajemen (<i>Dr. Ike Janita Dewi, M.B.A.</i>)	73
	1. Pengantar	73
	2. Industrialisasi dan Liberalisasi Pendidikan di Indonesia	76
	3. Peringkat sebagai Indikator Kualitas Pendidikan Tinggi	78
	4. Misi dan <i>Brand</i> Perguruan Tinggi	84

	5. Implikasi pada Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Manajemen di Indonesia	89
	6. Penutup	93
BAB 5	Meredefinisi Pendidikan Ekonomi Dasar: Suatu Pemberdayaan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis pada Ekonomi Rakyat (<i>Drs. Hyginus Suseno Triyanto Widodo, M.S.</i>)	97
	1. Pengantar	97
	2. Perspektif Makro	100
	3. Konsumsi dan Produksi	101
	4. Pendapatan Masyarakat	103
	5. Pengangguran	104
	6. Kenaikan Harga (Inflasi)	105
	7. Pengeluaran Pemerintah dan Pajak	107
	8. Perdagangan Internasional	109
	9. Kemakmuran Bangsa	110
	10. Persamaan Makro	111
	11. Perspektif Mikro	114
	12. Permintaan dan Penawaran	114
	13. Perilaku Konsumen dan Produsen	117
	14. Penutup	119
BAB 6	Pemimpin dan Kepemimpinan Intelektual (<i>Dr. H. Herry Maridjo, M.S.</i>)	123
	1. Pengantar	123
	2. Pemimpin dan Kepemimpinan	126
	3. Peran Pemimpin dalam Organisasi	128
	4. Manajer dan Pemimpin	129
	5. Tipe-Tipe Kepemimpinan	132
	6. Teori-Teori Kontemporer Kepemimpinan	136
	7. Pendidikan Tinggi: Mampukah Menyiapkan Pemimpin?	140

	8. Pendidikan Tinggi: Pembentuk Manusia Bermoral dan Berintelektual	143
	9. Kesimpulan	145
BAB 7	Merajut Mata Rantai <i>Learning Society</i> : Suatu Pengamatan pada Industri Penerbitan Buku (<i>Vinantius Mardi Widyadmono, S.E., M.B.A.</i>)	149
	1. Pengantar	149
	2. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa	151
	3. Membangun <i>Learning Society</i>	153
	4. Industri Penerbitan dan <i>Learning Society</i>	158
	5. Selanjutnya (<i>Follow-up</i>)	164
	6. Himbauan	165

BAGIAN III: EKONOMI KEPENDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN RAKYAT

BAB 8	Ekonomi Kependudukan Indonesia: Paradigma, Praktik, dan Kritik (<i>Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.</i>)	169
	1. Pengantar	169
	2. Perkembangan Paradigma Kependudukan	170
	3. Keluarga Berencana dan peningkatan Kualitas Hidup di Indonesia	174
	4. Penutup	176
BAB 9	Peran Strategis Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga bagi Pemberdayaan Rakyat (<i>Drs. V. Supriyanto, M.S.</i>)	181
	1. Latar Belakang Perlunya Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	181
	2. Pengertian Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	184
	3. Sasaran, Tujuan, dan Materi Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	185

3.1. Sasaran Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	185
3.2. Tujuan Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	186
3.3. Materi Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	187
4. Masalah yang dihadapi Setiap Keluarga	189
5. Pemecahan Masalah Khusus	191
6. Pelaksanaan Anggaran	196
7. Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga sebagai Pemberdayaan Rakyat	198
BAB 10 Hak-Hak Reproduksi dan Pendidikan Seksuali- tas: Suatu Perspektif Para Ahli Ekonomi Feminis (<i>Victoria Sundari Handoko, S.Sos., M.Si. & Antonius Budisusila, S.E., M.Soc.Sc.</i>)	203
1. Pengantar	203
2. Teori dan Pendekatan Kependudukan	204
3. Sikap Agama Katolik Atas Keluarga Beren- cana	209
4. Metode Ovulasi: KBA ala JJ Billings	210
5. Kesetaraan Gender: Kunci Sukses KBA	212
6. Kesetaraan Dan Kesehatan Reproduksi	216
7. Penutup	218
Epilog: Menuju Pendidikan Ekonomi Kerakyatan (<i>Drs. Titus Odong Kusumajati, MA</i>)	221

DAFTAR ISI

Kata Pengantar (Dr. Paulus Wiryana Priyatamtama, SJ.)	v
Daftar Isi	xix
Daftar Gambar dan Tabel	xxi
Prolog: Drs Theo Gilies Gilarso, SJ-Sang Ekonom Pendidik (Prof. Dr. Jammes Splillane, SJ.)	1
BAGIAN I: PENDIDIKAN BAGI PENGGERAK DAN GERAKAN RAKYAT	
BAB 1 Pergumulan Ikatan Petani Pancasila Usaha oleh dan untuk Kaum Tani Menuju Kemandirian (Dr. G. Budi Subanar, SJ.)	21
1. Pengantar	21
2. Kemunculan Gerakan	22
3. Perkembangan Gerakan	25

	4 Pendidikan Kemandirian (Petani) Selanjutnya	28
	5. Nasib Petani Jaman Sekarang	31
BAB 2	Ekonomi, Garis Massa dan Pendidikan (<i>Antonius Budisusila, S.E., M.Soc.Sc.</i>)	35
	1. Pengantar	35
	2. Arena Ekonomi, Kekuasaan dan Kebutuhan	37
	3. Kelembagaan Ekonomi Sekarang	42
	3.1. Teori Pasar dan Pilihan Publik	42
	3.2. Pendidikan dan Garis Massa	46

BAGIAN II: EKONOMI PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN EKONOMI

BAB 3	Globalisasi Pendidikan: Permasalahan dan Tantangan bagi Perguruan Tinggi Indonesia (<i>Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.</i>)	53
	1. Pengantar	53
	2. Lingkungan Eksternal Pendidikan Tinggi dan permasalahannya	56
	3. Bagaimana Menjawab Tantangan Global Pendidikan Tinggi?	61
	4. Penutup	70
BAB 4	Pendidikan dalam Pusaran Arus Industrialisasi Global: Implikasi Bagi Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Manajemen (<i>Dr. Ike Janita Dewi, M.B.A.</i>)	73
	1. Pengantar	73
	2. Industrialisasi dan Liberalisasi Pendidikan di Indonesia	76
	3. Peringkat sebagai Indikator Kualitas Pendidikan Tinggi	78
	4. Misi dan <i>Brand</i> Perguruan Tinggi	84

	5. Implikasi pada Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Manajemen di Indonesia	89
	6. Penutup	93
BAB 5	Meredefinisi Pendidikan Ekonomi Dasar: Suatu Pemberdayaan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis pada Ekonomi Rakyat (<i>Drs. Hyginus Suseno Triyanto Widodo, M.S.</i>)	97
	1. Pengantar	97
	2. Perspektif Makro	100
	3. Konsumsi dan Produksi	101
	4. Pendapatan Masyarakat	103
	5. Pengangguran	104
	6. Kenaikan Harga (Inflasi)	105
	7. Pengeluaran Pemerintah dan Pajak	107
	8. Perdagangan Internasional	109
	9. Kemakmuran Bangsa	110
	10. Persamaan Makro	111
	11. Perspektif Mikro	114
	12. Permintaan dan Penawaran	114
	13. Perilaku Konsumen dan Produsen	117
	14. Penutup	119
BAB 6	Pemimpin dan Kepemimpinan Intelektual (<i>Dr. H. Herry Maridjo, M.S.</i>)	123
	1. Pengantar	123
	2. Pemimpin dan Kepemimpinan	126
	3. Peran Pemimpin dalam Organisasi	128
	4. Manajer dan Pemimpin	129
	5. Tipe-Tipe Kepemimpinan	132
	6. Teori-Teori Kontemporer Kepemimpinan	136
	7. Pendidikan Tinggi: Mampukah Menyiapkan Pemimpin?	140

	8. Pendidikan Tinggi: Pembentuk Manusia Bermoral dan Berintelektual	143
	9. Kesimpulan	145
BAB 7	Merajut Mata Rantai <i>Learning Society</i> : Suatu Pengamatan pada Industri Penerbitan Buku (<i>Vinantius Mardi Widyadmono, S.E., M.B.A.</i>)	149
	1. Pengantar	149
	2. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa	151
	3. Membangun <i>Learning Society</i>	153
	4. Industri Penerbitan dan <i>Learning Society</i>	158
	5. Selanjutnya (<i>Follow-up</i>)	164
	6. Himbauan	165

BAGIAN III: EKONOMI KEPENDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN RAKYAT

BAB 8	Ekonomi Kependudukan Indonesia: Paradigma, Praktik, dan Kritik (<i>Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.</i>)	169
	1. Pengantar	169
	2. Perkembangan Paradigma Kependudukan	170
	3. Keluarga Berencana dan peningkatan Kualitas Hidup di Indonesia	174
	4. Penutup	176
BAB 9	Peran Strategis Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga bagi Pemberdayaan Rakyat (<i>Drs. V. Supriyanto, M.S.</i>)	181
	1. Latar Belakang Perlunya Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	181
	2. Pengertian Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	184
	3. Sasaran, Tujuan, dan Materi Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	185

3.1. Sasaran Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	185
3.2. Tujuan Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	186
3.3. Materi Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	187
4. Masalah yang dihadapi Setiap Keluarga	189
5. Pemecahan Masalah Khusus	191
6. Pelaksanaan Anggaran	196
7. Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga sebagai Pemberdayaan Rakyat	198
BAB 10 Hak-Hak Reproduksi dan Pendidikan Seksuali- tas: Suatu Perspektif Para Ahli Ekonomi Feminis (<i>Victoria Sundari Handoko, S.Sos., M.Si. & Antonius Budisusila, S.E., M.Soc.Sc.</i>)	203
1. Pengantar	203
2. Teori dan Pendekatan Kependudukan	204
3. Sikap Agama Katolik Atas Keluarga Beren- cana	209
4. Metode Ovulasi: KBA ala JJ Billings	210
5. Kesetaraan Gender: Kunci Sukses KBA	212
6. Kesetaraan Dan Kesehatan Reproduksi	216
7. Penutup	218
Epilog: Menuju Pendidikan Ekonomi Kerakyatan (<i>Drs. Titus Odong Kusumajati, MA</i>)	221

BAB 2

EKONOMI, GARIS MASSA, DAN PENDIDIKAN: Perspektif Ekonomi Institutional

Antonius Budisusila, SE, M.Soc.Sc.

1. Pengantar

Tulisan ini merupakan usaha mengenang Rm. Gieles dan karyanya sebagai ekonom, pendidik, misionaris dan rohaniwan. Berada di dunia ketiga yang didera kemelaratan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran dan kehidupan yang tak menentu paska kolonialisme, Rm. Gieles berkarya melalui berbagai belahan pendidikan. Karyanya berorientasi pada usaha mengentaskan kondisi masyarakat pasca-kolonial. Manusia, pendidikan, dan ekonomi adalah "kata kunci" yang melekat pada dirinya. Wilayah edukasi yang digeluti Rm Gieles diantaranya adalah pendidikan kader masyarakat, pendidikan ekonomi, pendidikan formal para guru, bengkel perkawinan, pendidikan seksualitas bagi para calon pasangan suami istri, keluarga berencana, dan rohani (melalui *week-end moral*).

Tidak mudah menempatkan Rm. Gieles dalam kerangka pikir yang tunggal, tetapi multi-interpretatif dan unik. Sifat karyanya yang unik dan multi-interpretasi tidak mudah mencari rujukan dasar dalam studi pemikiran ekonomi. Namun bisa juga mudah, manakala kita melihat konsistensi nilai yang melekat dalam karya-nya: *men and women for and with others, option for the poor, kesederhanaan, bersahaja dan mencerdaskan rakyat*. Nilai-nilai ini lekat dalam kehidupan sehari-hari beliau dan tidak terbantahkan.

Sebuah buku yang diterjemahkan oleh Rm. Gieles memberi saya suatu gambaran dan panduan. Buku itu berjudul *Pemikiran Para Ekonomi Terkemuka: dari Aristóteles hingga Keynes*, ditulis oleh George Soule (Yogyakarta: PT. Kanisius, 1994). Beliau hendak mengingatkan bahwa pemikiran ekonomi tidak saja bermuara pada pandangan teori klasik dan kebangkitannya (Adam Smith dan para pendukungnya) dan modern (Keynes dan pendukungnya) sebagai arus utama pemikiran ekonomi. Terdapat berbagai alternatif pemikiran lain yakni kaum sosialisme negara (Marx dan pendukungnya) atau sosialisme kerakyatan (Marx-muda; Robert Owen, Muller, Proudhon) yang menginspirasi para pendiri bangsa di dunia ketiga membebaskan diri dari kepit-an pemerintahan kolonial, seperti karya dan pemikiran: Hatta, Gandhi, dan Mao Zedong. Bahkan pemikiran kaum "Veblenian" yang dikenal sebagai ekonomi institusional atau ekonomi post-industrial, semestinya perlu dipertimbangkan sebagai pemikiran kritis bagi ilmu ekonomi modern sekarang ini.

Pemikiran mengenai manusia, pendidikan dan ekonomi paska kolonialisme di dunia ketiga, sejatinya lebih mudah dijumpai dalam tradisi pemikiran ketiga dan keempat daripada arus utama pemikiran ekonomi (klasik, neoklasik, dan modern). Misalnya, semangat para pendiri bangsa ini, Hatta (1934) menyatakan bahwa gerakan ekonomi tidak lain adalah pendidikan rakyat yang berkelanjutan untuk mewujudkan dan

membangun kader rakyat untuk mampu berorganisasi atau tata kelola dan institusi yang mandiri, berekonomi atau suatu usaha memenuhi kebutuhan dasar komunitas manusia secara berdikari, dan berpolitik atau otoritas untuk mampu mengambil keputusan atas dasar subsidiaritas. Sayangnya, pemikiran ini berada dalam arena ekonomi dimana arus pemikiran kuat memisah dan memarginalisasi ketiga tujuan mendasar itu, sehingga tata kelola ekonomi tidak lagi dijadikan sebagai pegangan memperkuat rakyat biasa (*the commoners*). Oleh karena itu, pendidikan (rakyat) hendaklah menjadi daya gerak memperkuat posisi rakyat. Tulisan ini mencoba memposisikannya dalam pemikiran itu (meski terlalu awal dan spekulatif). Suatu usaha mendorong suatu negara berdaulat, sistem ekonomi sosial yang berdikari menjadi alternatif yang semestinya perlu dikembangkan dan dimulai.

2. Arena Ekonomi, Kekuasaan, dan Kebutuhan

Analisis ekonomi-sosial (Weber misalnya) menggunakan terminologi masyarakat dan ekonomi (lihat *Economy and Society*, Weber Vol. 1&2). Teori ini ada untuk menampilkan bahwa ekonomi selalu diidentifikasi sebagai studi pasar dan ekonomi, sementara kata "masyarakat" jauh di luar arena itu. Masyarakat pada situasi yang semakin berlapis telah membuat masyarakat terpisah dalam kelas sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Kelas sosial, ekonomi, dan kekuasaan melekat pada masyarakat membentuk suatu hubungan fungsional dan konflik. Sejatinnya fungsi dan disfungsi, atau konflik tidak terletak pada ruang yang berbeda, tetapi sering berada dalam suatu medan yang sama. Tetapi sistem sosial-ekonomi terus mengalami pergeseran dari suatu sistem sosial berbagi (*shared wealth*) kepada sistem pertukaran yang bersifat spekulatif (*speculative exchange system*) dan transaksi berbiaya. Arena ekonomi telah bergeser dari sifatnya yang

“bersama” (*common arena*) kepada sistem pertukaran atau pasar yang bersifat individual (*private arena*). Usaha ekonomi yang berperan memenuhi kebutuhan secara mandiri di kalangan masyarakat biasa telah tercerabut perannya digantikan oleh pelaku ekonomi yang terpisah. Secara makroekonomi, kata ekonomi dan masyarakat tidak lagi bersifat dikotomis, tetapi trikotomis di mana rakyat (jelata), rakyat biasa, atau kaum marhaen ini terlempar dari arena permainan ekonomi, sosial dan politiknya. Akibatnya, mekanisme konflik dan pertikaian, sejalan dengan kesadaran masyarakat pada kelas-kelas rendah memperjuangkan kesetaraan dan keadilan, kian menguat dan tak terhindarkan.

Meminjam pandangan Kenneth Boulding (1957), sistem sosio-ekonomi merupakan metafora dari sosio-budaya, ekologi, moral dan ekonomi. Berdasarkan pandangan ini, realitas ekonomi dapat dibelah ke dalam tiga arena sebagai basis interaksi yang seimbang dalam konteks masyarakat sederhana (Gambar 2.1). Pada mulanya setiap pelaku ekonomi-sosial mempunyai suatu “otoritas” bersama dalam menggunakan arena ekonomi atau setidaknya distribusi wilayah untuk setiap pelaku dan bersifat relatif merata. Ini mudah dimengerti karena sumber-sumber kekuasaan ekonomi adalah bersifat *endowments* dimana suatu pemberian yang bersifat kodrati seperti alam, manusia (*inherent* dengan talenta, kemampuan dan kemahiran) dan lingkungan.



Gambar 1.1. Sistem Ekonomi-Sosial Masyarakat Sederhana

Bersumber dari sumber-sumber natural, manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan melalui upaya penciptaan institusi yang terpadu dengan sistem ekologi dan sosialnya. Semenjak institusi itu ada, muncullah “ilmu pengaturan/pengelolaan” yang berperan sebagai cara memastikan manusia dalam suatu komunitas atau antarkomunitas mampu memenuhi kebutuhannya, baik melalui sistem berbagi maupun pertukaran. Karakteristik dasar kelembagaan seperti ini telah menjadi suatu napas, dasar dan mewarnai dalam pembuatan kebijakan pemerintah Indonesia; misalnya, UU Pokok Agraria 1960. Tanah menurut UU ini merupakan suatu manifesto atas pemikiran *the founding fathers* yang bercirikan populis. Nordholt (1992) menyatakan bahwa Undang-undang ini merupakan suatu pemikiran para kaum neo-populis dimana tanah pada dasarnya adalah kepemilikan bersama yang dalam operasionalnya akan dikelola secara kooperatif oleh masyarakat biasa dan bukan dikuasakan atau dikuasai oleh seorang pengusaha perkebunan besar. Kepemilikan privat dan negara diakomodasi dalam rangka memperkuat dan menjawab kebutuhan bersama. Ini juga memberikan makna bahwa tanah sebagai komoditas strategis. Artinya konsep tanah yang tidak boleh menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mencari keuntungan ekonomis semata.

Kepemilikan bersama melekat pada sistem sosial berbagi. Sistem ekonomi-sosial berbagi adalah ciri perilaku *commune*, kental nilai solidaritas, berbagi, gotong-royong, *muttually help activities*, tetapi juga melekat *selfhelp*, konflik dan resolusi konflik. Sistem ekonomi ini juga melekat pada pengelolaan sumber-sumber bersama (*common properties*) baik itu sumber-sumber asli (tanah, hutan, laut dan sebagainya) maupun sumber-sumber bersama yang bersifat dikreasi manusia, termasuklah institusi seperti *rembug* (musyawarah) dan *paguyuban, adat*, dan sebagainya. Sumber-sumber ekonomi masih mendukung interaksi

sosial, sehingga masyarakat masih menentukan kebudayaan mereka sendiri yang terhasil dari suatu budidaya, olah-pikir, olah trampil/gladi para anggota komunitasnya (seperti teknologi, seni, barang dan jasa). Oleh karenanya, sistem sosial selalu terpadu dengan ekonomi, ekologi dan budaya dimana sistem ini berkembang.

Sejarah panjang dalam pengembangan pranata dan kelembagaan berbagi dalam kehidupan sosial-ekonomi merupakan sistem yang berfungsi untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat pada zamannya. Suatu kali kita telah menyepakati "gotong royong" sebagai salah satu ciri lembaga masyarakat yang mengurus ekonomi bersama dalam suatu masyarakat, yang kita jumpai dengan berbagai nama tempatan. Pada masa setelah kemerdekaan, bahkan, dianggap sama antara gotong royong dan nilai yang menjadi dasar kehidupan berekonomi. Konsekuensinya, sistem ekonomi koperasi hadir dalam tata kelola perekonomian Indonesia, meski argumen ini dianggap kurang memiliki dasar logika ekonomi klasik dan modern. Tetapi suatu kali kita mempertanyakan apakah gotong royong itu ciri kebudayaan "substansial" dari eksistensi masyarakat pada masanya.

Arena kedua adalah arena para pemilik modal (kaum borjuasi) yang lebih dikenal sebagai "pasar". Arena ini juga dikenal sejak manusia ada, namun peranan hanya dalam rangka memenuhi kehidupan berekonomi. Arena ini dikenal pada mulanya sebagai sistem pertukaran dan bukan persaingan. Sistem pertukaran juga telah dikenal pada masyarakat sederhana, namun lebih bersifat resiprositas dan redistributif sehingga pertukaran hampir tanpa biaya transaksi. Bahkan prinsip-prinsip resiprositas dan redistribusi yang luas telah membantu mengamankan, baik produksi dan kelangsungan hidup keluarga

dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Polany (1944:55) hal itu terjadi karena :

...the orderly production and distribution of goods was secured through a great variety of individual motives disciplined by general principles of behavior. Among these motives gain was not prominent. Custom and law, magic and religion co-operated in inducing the individual to comply with rules of behavior which, eventually, ensured his functioning in economic system

Pertukaran demikian memberikan suatu asumsi dasar bahwa ekonomi masih melekat pada rakyat, artinya rakyat masih menjadi bagian dari sistem produksi sekaligus bagian dari mekanisme konsumsi. Pertukaran kemudian menjadi bergeser makna sejak didedah dan didefinisi oleh Adam Smith (1776) bahwa: *propensity to barter, truck and exchange one thing for another*, kemudian diperkuat oleh pengikutnya pasca Smith seperti Richardo, motif ekonomi terpisah dan tidak lekat dengan resiprositas dan redistribusi. Ini dikenal sebagai *Rational Economic Man*. Para pendukungnya mulai menemukan perubahan evolutif dari pola pasar terisolasi kepada ekonomi pasar yang mampu mengatur dirinya sendiri (*swatata*). Pasar akan mencapai perluasan-perluasan yang dianggap sebagai puncak peradaban. Coase mendemonstrasikan bahwa inefisiensi bisa terjadi bukan hanya karena struktur pasar yang tidak sempurna (sesuatu yang diingkari oleh ekonomi klasik/neoklasik), melainkan juga karena kehadiran secara implisit biaya transaksi (North, 1992).

Arena ketiga adalah arena publik/umum. Arena ini merupakan lapangan pemerintah sebagai salah satu agen negara yang mempunyai "kekuasaan" untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, ekonomi dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (Miriam Budiarmo, 1992); suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah ala Weber. Pemerintah sejatinya regulator utama yang terus menjaga

setiap arena sehingga masing-masing pelaku dapat berlangsung dan berlangsung terus memenuhi kebutuhannya.

3. Kelembagaan Ekonomi Sekarang

3.1. Teori Pasar dan Pilihan Publik

Tiga institusi gergasi “Bretton Woods” (IMF, World Bank (dulu IBRD), WTO)²⁵ yang paling berkuasa di tingkat global telah mengambil peran utama dalam mengenalkan penyeragaman sistem sosio-ekonomi dunia ketiga. Menguatnya kekuatan ekonomi pasar (*counter-revolusi* klasik) telah menabrak dinding dan wilayah kewenangan pengaturan arena bersama/rakyat dan peran negara yang direpresentasi oleh pemerintah. Dibarengi dengan pemberlakuan teori pilihan publik ala Buchanan ditemukanlah “baju musim panas” yang kian perlu dikenakan setiap negara. Hal ini memberi ruang dan iklim bagi tumbuhnya sistem neoliberalisme ini. Buchanan menampilkan *public choice theory* dalam beberapa pengertian berikut:

1. Teori ini domainnya tetap “pasar” yaitu pasar akan barang dan jasa publik.
2. Teori pilihan publik memandang penting tentang konsep komodifikasi layanan publik, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*.
3. Cara pandang ini datang dari sumberdaya publik berupa “kekuasaan” yang merupakan sumberdaya menentukan, atau suatu ancaman bagi pelaku ekonomi besar.
4. Teori ini memandang suatu peraturan, UU, dan kebijakan adalah komoditas pasar yang semuanya itu harus/ dapat diperjualbelikan.
5. Melihat ranah publik yang dapat diperjualbelikan merupakan kesempatan bagi para pelaku ekonomi untuk

25. Lebih lanjut baca Wibowo & Wahono (2003)

mendapatkan regulasi atau pengaturan seperti: proteksi, lisensi, hak cipta, dan sebagainya. Harga komoditas “kebijakan” di pasar publik disebut harga politik.

Teori pasar dan agensi-serta kekuatan ekspansinya, serta kombinasinya dengan teori pilihan publik-menjelaskan mengapa ekonomi cenderung dikuasai oleh kelompok-kelompok elit *status quo*. Kelemahan dan kekuatan pasar dalam teori klasik menunjukkan bahwa para ekonom klasik tidak pernah menyadari ketidakterjawaban masalah utama ekonomi dan sosial (distribusi sumberdaya dan hasil, kekuatan politik, sosial dan sebagainya). Upaya penyeragaman sistem ekonomi dunia, sekali lagi masih dimenangkan oleh kaum ekonomi neoliberal. Bahkan kepitan itu semakin kuat seiring dengan gerak deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi di dunia ketiga. Pengambil-alihan kuasa dan hilangnya kuasa negara menjadikan korporasi berkuasa kuat di abad ini. Bahkan, negara bukan pemilik kewenangan fisik dan kekerasan satu-satunya. Kita sudah banyak disuguhi fakta ini, seperti tentara bayaran untuk melindungi korporasi dan koruptor, satuan polisi pamong praja yang justru menjadi alat-alat kekuasaan pebisnis besar, dan penggunaan preman dalam tata pemerintahan di lokal, daerah, maupun nasional.

Neoliberalisme yang dikomandani semangat kapitalisme dan kemampuan menggandeng kelembagaan ekonomi-sosial dibawah nilai-nilai itu telah mengeluarkan berbagai bentuk komoditas palsu. Komoditas palsu ini berakibat pada dehumanisasi seperti perdagangan anak dan perempuan, serta degradasi lingkungan. Logika ini dapat dirujuk dalam pemikiran Polany (1944) yang berusaha mengingatkan hakikat pasar dan perbuatan tak terpujinya.

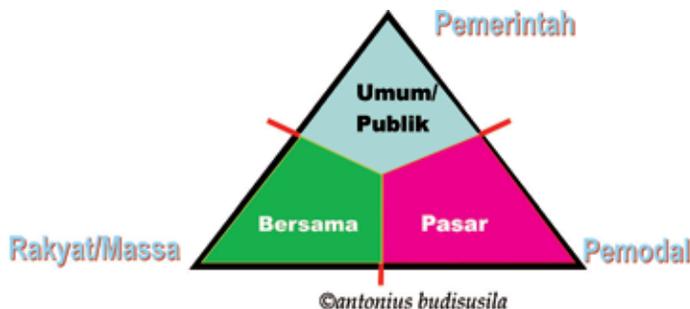
Pasar dan Kayalan Komoditas. Komoditas secara empiris itu didefinisikan sebagai objek-objek yang diproduksi untuk dijual di pasar. Sejak pasar sebagai jawara di arena ekonomi-sosial terjadilah sejumlah “tabiat tak terpuji tentang komodifikasi”.

Suatu semangat "loba" membangkitkan "komodifikasi" atas manusia dan sumber alam yang tidak selayaknya sebagai komoditas. Manusia dan alam tidak pernah ada yang mampu "memproduksi"-nya. Keduanya strategis disebabkan manusia dan alam sejak masa feodalisme hingga sekarang tetap merupakan sumber-sumber penting bagi kehidupan berekonomi, bersosial dan berpolitik. Pasar yang telah menjadi sistem mekanis menentukan sistem-sistem sosial lainnya berakibat pada komodifikasi manusia dan alam. Istilah yang sekarang populer di pasar tenaga kerja sebagai "perdagangan manusia".

Sebaik tenaga kerja dan tanah, mereka tidak lain adalah umat manusia yang menjadi bagian dari sistem masyarakat dan lingkungan alam di mana masyarakat berada. Memasukkan keduanya dalam mekanisme pasar berarti mensubordinasikan hakikat rakyat/manusia terhadap hukum-hukum pasar. Oleh pasar, tenaga dari rakyat biasa selalu direduksi "menjadi tenaga-fisik' tanpa otak dan jiwa, maka rakyat masih syarat dengan tindak kekerasan oleh para pemilik kekerasan di mana-mana. Padahal, tenaga kerja adalah nama lain dari manusia, tanah adalah nama lain dari alam. Kaum merkantilis seperti Sir William Petty, Jean Baptist Colbert saja mampu berujar bahwa "*labour is father, and land is mother*". Keduanya jelas tidak diproduksi manusia dan bukan semata-mata objek. Dunia ekonomi sejak abad ke-19 telah bergerak jauh menghadapi perbuatan-perbuatan tak terpuji itu, bayangkan "*bapak dan ibu*" menjadi komoditas yang diperjual belikan. Hanya anak durhaka yang mampu melakukan itu.

Komoditas uang. Uang sebenarnya hanyalah simbol atau petanda atas daya beli yang biasanya tidak diproduksi, uang dikerjakan melalui mekanisme perbankan dan keuangan negara, tetapi uang dan modal justeru dapat diperjual belikan melalui pasar uang. Jual beli uang dipastikan akan menghambat produksi barang dan jasa yang wujud sebagai pemenuhan

kebutuhan manusia. Apalagi bagi mereka yang jauh dari akses kelembagaan keuangan semacam ini seperti petani, buruh, dan rakyat biasa lainnya.



Gambar 1.2. Trikotomi Masyarakat Menguat Sejalan dengan Paham Neoliberalisme

Pasar kebijakan dan akibatnya. Pasar swatata (*selfregulating*) mengandaikan bahwa negara bebas dari percaturan di setiap arena, maka yang terjadi jelas pertarungan rakyat vis a vis pemodal (besar). Lebih buruk lagi kebijakan sebagai "tindakan bijak" masih perlu dikomodifikasikan. Jika demikian peraturan dan undang-undang, sebagai legitimasi nilai, norma dan pengaturan "justru terbeli", harga politiknya menjadi tak terbatas, malah rentan suap dan korupsi. Pergeseran dari Gambar 1.1. menuju Gambar 1.2. adalah aneksasi para pemodal terhadap ruang bersama dan publik. Akhirnya akan menuju pada "negara gagal" yang bermakna tidak ada kebijaksanaan (*stateless*). Mengijinkan mekanisme pasar menjadi satu-satunya pengatur nilai dan kegunaan daya beli, jelas akan menghancurkan tatakelola ekonomi dan rakyat. Keseluruhan ini muncul karena terlepasnya sumberdaya pada mekanisme pasar dan masuk di arena para pemilik kapital yang didasari semangat loba dan hedonisme ini. Rakyat mengalami deprivasi, kemerosotan hidup,

kompetisi sengit, dan ketidakberdayaan. Alam berada dalam kondisi tereksplorasi, tercemar, dan kehilangan daya dukung bagi pemenuhan kebutuhan rakyat.

3.2. Pendidikan dan Garis Massa

Garis massa dipakai oleh Mao Zedong dalam konteks perjuangan melawan kolonialisme Jepang. Garis massa merupakan lawan kata garis komando. Kekhasan Mao adalah pemikiran mengenai peranan petani yang besar dalam revolusi, menyimpang dari anggapan dasar Marxisme-Leninisme tentang 'diktator proletariat'. Enam kelas sosial masyarakat menurut Mao meliputi (1) kelas tuan tanah (2) kelas borjuis (3) kelas borjuis kecil (4) kelas petani tuna-kisma (*peasants*) (5) kelas proletar, dan (6) kaum gelandangan (Wibowo, 1983).

Pengkelasan Mao dipakai sebagai operasionalisasi istilah "massa". Istilah ini digunakan dalam kelas-kelas yang bertentangan yang tak mungkin didamaikan. Meskipun Mao tidak mendefinisikan tegas, namun massa merujuk pada jenis pekerjaan seperti petani, buruh, pelajar, polisi, guru, dan wanita. Massa pada dasarnya bodoh, tidak terdidik, dan tidak berani bersikap maka membutuhkan "partai". 'Partai' bukan dalam pengertian yang umum, tetapi garis massa adalah mempercayai massa sebagai "daya gerak" di mana kepemimpinan mestilah dari massa. Metode garis massa bekerja melalui empat tahapan yakni: *perception* (intensitas perjumpaan dalam belajar bersama massa, membaca kehendak massa), *summarization* (mengumpulkan-melalui suatu penelitian-untuk bisa disistematiskan), *authorization* (membawanya kembali kepada massa agar menjadi bagian dari pengetahuan dan kesadaran mereka), dan *implemantation* (me-reka menjalankannya sebagai bagian dirinya).

Prinsipnya adalah asas subsidiaritas dan pengembangan kapasitas rakyat yang berkelanjutan melalui suatu proses yang

dialogis. Pengembangan kapasitas rakyat harus dipahami sebagai pengertian daya nalar-kritis, daya gerak, dan bertindak yang merupakan bagian dari garis massa itu sendiri. Dalam hal ini, Rm. Gieles mempunyai koneksi dengan pemahaman konsep itu (tidak eksplisit). Beliau juga menawarkan kepada subjek (umat/ rakyat) dalam kerangka metode ini, melalui berbagai objek pendidikan seperti pendidikan kader penggerak pembangunan, pendidikan rumah tangga dan keluarga, maupun kepada peserta didik di kampus. Misal saja, sebuah surat beliau yang ditujukan kepada superior serikat Jesuit bahwa "*kursus Pembimbing Tenaga Pembangunan Masyarakat yang secara ilmu pendidikan bisa dipertanggungjawabkan, betul-betul memerlukan dukungan dan bimbingan dari suatu lembaga pendidikan yang lebih tinggi untuk pendidikan orang-orang dewasa dan penggerak masyarakat yang bekerja di lapangan sosio-edukatif dan sosio-ekonomis (Surat Rama T. Gilarso ditujukan kepada Pimpinan SJ di Indonesia, tertanggal 15 Agustus 1974).*"

Pernyataan ini meyakinkan tentang pentingnya peran dialogis antara pendidikan tinggi dan rakyat (*the commoners*) untuk memperkuat peran dan partisipasi rakyat dalam berekonomi-sosial dan berpolitik. Dalam pengertian Gramsci, inilah yang disebut sebagai intelektual organis. Pengertian ini juga mempunyai keserupaan dengan Hatta (1957) dengan istilah masyarakat biasa atau *wong cilik* atau kaum Marhaen, partai itu adalah koperasi sebagai pendidikan kader massa melalui guru-guru sebagai pendidik dan motivator. Jadi substansi koperasi adalah partai yang berfungsi melakukan pendidikan bagi para anggota dan kader-kadernya untuk sadar berorganisasi, berekonomi, dan berpolitik. Sejarah sukses kebangkitan ekonomi dan koperasi hanya terjadi ketika berbasis rakyat, disertai kesadaran melakukan pendidikan dalam kerangka garis massa (lihat Tabel 1.1.). Oleh karena itu, koperasi adalah siasat dan gerakan perlawanan (dalam pengertian sosial), dengan usaha

Tabel 1.1. Gerakan Koperasi dan Hilangnya Kepercayaan Rakyat terhadap Koperasi di Indonesia, Tahun 1891-2001

Period	Years	Policy	Reasons for Losing Confidence
1890-1907	First Purwokerto	Philanthropic	Poor management & too hurry in rising quantity
1908-1912	Budi Utomo's Initiative	Educational	Lack organization & knowledge at all levels
1913-1915	Sarekat Dagang Islam	Religious	Too much propaganda & quantity in short time
1915-1926	Netherlands' Cooperative Bill	Imitation	Costly and complicated procedure, disrespect Indonesian customary rights & land inheritance
1927-1928	Indian Inspired Regulation	Top-down	Too much government supervision & audit
1929-1933	Regional Intellectual elite	Delegation	Too sophisticated & poor process; recession
1934-1942	Rural schoolmasters as motivators & educators	Community Based	Successful: 574 cooperatives, 52,555 members and capital: fl. 351,544 = US\$ 878,860 (in 1944), but destroyed by War's scorched-earth policy
1943-1945	Japanese Occupation	Exploitation	Rural schoolmasters' involvement forbidden/misused of cooperative function by Japanese for military & colonial firms interests
1946-1949	Hatta's Initiative 1	State ethical Leadership	Rural consumption cooperative and cadres but Dutch blockade & poor control crushed it
1950-1957	Hatta's Initiative 2	State as Motivator & Facilitator	Cooperative climate created through state facilities & supports, but the resignation of Hatta caused fledgling cooperative crumbled
1959-1966	Soekarno's Guided Economy	President knows best	Cooperative became vehicle for the uneven distribution of Japanese War's repayment.
1967-1998	Soeharto's Ersatz Capitalism	First family Interests	State controlled cooperative (KUD) & managed trade, portfolio cooperative & tax for cooperative
1998-1999	Adi Sasono's Initiative	Political	Corruption due to poor planning & practices
2000-	Freedom for people's Initiatives & NGOs' works	Participative	Taking community spirit and people-centred approach with high financial discipline

Note: Table by Francis Wahono based on Roesli Rahim. 1956. "Introduction" to Mohammad Hatta. 1957. The Co-operative Movement in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, pp.xv-xxxiv; plus the update.

pendidikan yang menjaga rakyat jelata maupun masyarakat luas, agar perlawanan terhadap 'loba' globalisasi neoliberal tidak jatuh mempergunakan semangat 'loba' yang sama.

Lahirnya khayalan komoditas dan pasar yang mampu meregulasi sendiri, rakyat biasa (baca: massa) kehilangan "arena"nya. Sementara arena adalah sumber-sumber bagi pemenuhan kehidupan berekonomi, bersosial, dan berpolitik. Rumusan Karl Marx tentang buruh merebut *means of production*, sarana produksi (seperti masyarakat adat merebut hutan dan kandungan bumi, reklamasi tanah di Jenggawah, Wonosobo, Batang, Lampung Selatan, Jombang dan Lombok) merupakan kaedah atau aksi belum akhir. Jalan di dunia adalah jalan proses dan pilihan trak dan jalur yang benar, maka harus selalu mengkritisi usaha diri. Sistem yang ditawarkan komunisme maupun Karl Marx tidak memberi ruang pada kritik atas kritik.

Meminjam pengertian Wahono (2001) dibutuhkan dinamika Praxis (tindakan yang terefleksi, atau refleksi yang dites di aksi). Dinamika ini adalah jalan perubahan sosial individual sebagai bagian struktural, atau struktural yang memberi ruang dorong bagi peran individual. Oleh karena itu, sistem ekonomi adalah keseluruhan lembaga (formal maupun informal) yang hidup di tengah masyarakat yang dijadikan tuntutan masyarakat untuk berpikir, berasa, dan bertindak untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup mendasar lainnya. Di Indonesia dinamailah sebagai sistem Ekonomi Kerakyatan yang tercermin dalam UUD 1945 Pasal 33 dan Pasal 27. Maksudnya jelas: massa/rakyat dilibatkan dalam setiap proses produksi dan dalam hal produksi tersebut, rakyat mempunyai arti yang terpenting. Penanganannya langsung di bawah negara melalui kerja para pelaku ekonomi. Dengan kata lain, sifat kolektivisme untuk kepentingan bersama atau hasil produksi harus dinikmati oleh masyarakat luas atau bersama-sama, orang banyak atau kemakmuran rakyat. Pasal 27 juga menjelaskan bahwa tiap

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Implikasinya mendasar: “*rakyat harus hidup berkecukupan dengan berbasis pada kerja*”. Oleh karena itu, rakyat mestilah berorganisasi, berekonomi, dan berpolitik. Rakyat tidak hidup di atas subsidi dan bantuan oleh pihak-pihak yang justru turut menjepitnya. []

Daftar Pustaka

- Boulding, Kenneth. 1970. *Economics as a Science*. Bombay: Tata Mcgrwa-Hill.
- Hatta, Mohammad. Editor: I. Wangsa Widjaja and Meutia Farida Swasono.1985. *Membangun Ekonomi Indonesia: Kumpulan Pidato* [Building the Economy of Indonesia: Collected Speeches]. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Hatta, Mohammad. 1957. *The Co-operative Movement in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Mubyarto, Daniel W. Bromley, 2002. *A Developments Alternative for Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- North C, Douglass.1982. *Institutions, Instituional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Polany, Karl.1944. *The Great Transformation: the Political and Economic Origins of Our*. Boston: Boston Press.
- Wahono, Francis.2001.*Appraising the Community Based Social and Economic Development: An Indonesia Case with Special Reference to a YAKKUM Field Experience*, makalah seminar di Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM).
- Wibowo, I. 1983. *Konsepsi Mao Zedong tentang Garis Massa*. Fakultas Sastra-UI.
- Wibowo, I ; Wahono, Francis. 2003. *Neoliberalisme*. Yogyakarta: CPRC.
- Soule, George. 1994. *Pemikiran Para Ekonomi Terkemuka: dari Aristóteles hinggá Keynes*. Yogyakarta: PT. Kanisius.